

BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Banjarnegara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana pada tabel dibawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Lokasi Server	UU Nomor 11/2008 tlg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl. 30-37	Tdk terbatas	Adanya kriminal dan pengrusakan serta pencurian data Penyalahgunaan hak akses	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data – data yg ada Melindung operator
2.	Internet Protokol/IPAdress Private	UU Nomor 11/2008 tlg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl. 30	Tdk terbatas	Penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak akses
3.	Bendwilde Management	UU Nomor 11/2008 tlg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl. 30	Tdk terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bendwith diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bendwilde
4.	Kunci Sistim Sandi	UU Nomor 11/2008 tlg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl. 17 c 6	Tdk terbatas	Penyalahgunaan berita	Melindungi berita sandi
5.	Data Frekuensi Komunikasi Mikrotik	UU Nomor 11/2008 tlg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl. 17 c 6	Tdk terbatas	Penyalahgunaan berita	Melindungi jalur komunikasi
6.	Data Pribadi	UU No.24/2013 tlg perubahan atas UU No. 23/2006 tlg Administrasi Kependudukan P.1 (22)	Tdk terbatas	Mengungkap rahasia personal	Melindungi data pribadi

1	2	3	4	5	6
7.	Laporan pemeriksaan BPK hasil BPK	UU No. 15/2004 P.19 dan UU No. 15/2006 tlg BPK P.7	Setelah diserahkan ke DPRD	Mengganggu terperiksa	Rahasia pihak terperiksa
8.	Dokumen penawaran penyediaan jasa	Perpres No. 54/2010 tlg Pengadaan barang/jasa Pemerintah	Selama masih digunakan	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat obyektifitas penilaian
9.	Dokumen Kontrak	UU No. 30/2014 tlg Administrasi pemerintahan, Perpres RI No. 54/2010 tlg Pengadaan barang/jasa Pemerintah	Sampai proses audit BPK	Menghambat kesuksesan kebijakan krm adanya pengungkapan scr prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama
10.	Data pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	UU No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara	Sampai dengan pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan krm adanya pengungkapan scr prematur	Melindungi proses kebijakan ASN
11.	Dokumen rekam medis termasuk nomor regresiasi rekam medis	UU No. 35/2009 tlg Kesehatan P. 57(1), UU No. 29/2004 tlg Praktek Kedokteran	Tdk terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
12.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU No. 35/2009 tlg Kesehatan P. 57(1), UU No. 29/2004 tlg Praktek Kedokteran	Tdk terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
13.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Permenkes 1419/MENKES/PER/X/2004 P 18(1), UU No. 29/2004 tlg Praktek Kedokteran P. 48 dan P 51c	Tdk terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
14.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Kemendes 496/Mendes/SK/IV/2005	Tdk terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
15.	Data HIV/AIDS Penderita	Permenkes No. 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS	Tdk terbatas	Potensi kerawanan/kekawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut di tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Ir. Singeih Haryono	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda	Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara	
2	Drs. Suyatno, M.Hum	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara	
3	Soleman, SH	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara	
4	Budianto, SH	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara	
5	Suprayogo, SIP	Kepala Seksi Pelayanan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

SEKRATARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
SELAKU ATAPAN PID UTAMA


INDARTO